

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENERIMAAN GELAR ADAT BAGI PENDATANG OLEH SUKU MARIND KARENA PERKAWINAN EKSOGAMI DI KABUPATEN MERAUKE PAPUA



**OLEH
WULANDARY
B 111 07 218**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**AKIBAT HUKUM PENERIMAAN GELAR ADAT BAGI
PENDATANG OLEH SUKU MARIND KARENA PERKAWINAN
EKSOGAMI DI KABUPATEN MERAUKE PAPUA**

OLEH:

WULANDARY

B 111 07 218

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENERIMAAN GELAR ADAT BAGI PENDATANG OLEH SUKU MARIND KARENA PERKAWINAN EKSOGAMI DI KABUPATEN MERAUKE PAPUA

Disusun dan diajukan oleh

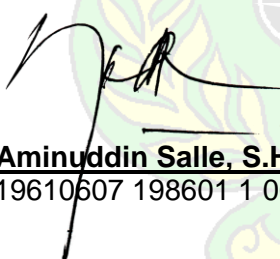
WULANDARY

B 111 07 218

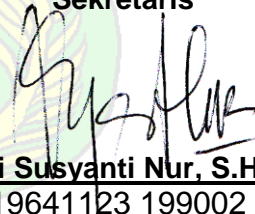
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 7 Nopember 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

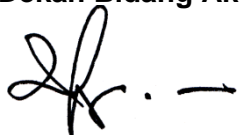
Ketua


Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

Sekretaris


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Wulandary**

No. Pokok : **B 111 07 218**

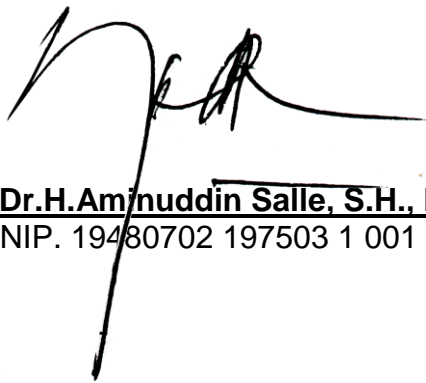
Bagian : **HUKUM KEPERDATAAN**

JudulSkripsi : **Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat Bagi Pendatang
Oleh Suku Marind Karena Perkawinan Eksogami Di
Kabupaten Merauke Papua**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

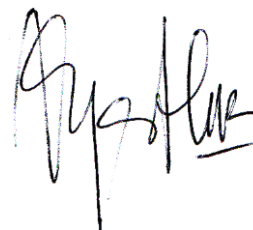
Makassar, Oktober 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
NIP. 19480702 197503 1 001

Pmbimbing II



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **WULANDARY**
No. Pokok : **B 111 07 218**
Bagian : **HUKUM KEPERDATAAN**
JudulSkripsi : **Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat Bagi Pendatang
Oleh Suku Marind Karena Perkawinan Eksogami Di
Kabupaten Merauke Papua**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2013

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP.196304191989031003

ABSTRAK

WULANDARY. Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat Bagi Pendatang oleh Suku Marind Karena Perkawinan Eksogami di Kabupaten Merauke Papua. (dibimbing oleh Aminuddin Salle dan Sri Susyanti Nur)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan di lembaga adat Suku Marind di Kabupaten Merauke, (2) untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap individu yang memperoleh gelar adat akibat perkawinan di lembaga adat Suku Marind di Kabupaten Merauke.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Merauke. Jenis penelitian ini adalah sosiologis yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara menganalisis secara rasional data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat-masyarakat yang merupakan anggota dari masyarakat adat suku Marind serta para tetua-tetua adatnya dan disajikan secara analitis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan di dalam masyarakat adat suku marind dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tata caranya yaitu dengan memberikan beberapa mas kawin yang telah ditetapkan jenisnya dan melakukan beberapa ritual/prosesi adat peminangan (bagi laki-laki). (2) Akibat hukum dari pemberian gelar akibat perkawinan eksogami yang dilakukan dalam masyarakat adat suku Marind terdiri dari dua hal yaitu hak dan kewajiban. Hak-hak yang ditimbulkan berupa hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tergolong dalam teritorial suku Marind, hak untuk berdomisili dan hak dusun. Sedangkan kewajibannya adalah kewajiban untuk memberikan nafkah (bagi suami), kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis, kewajiban untuk menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat suku Marind dan pemberian nama marga dibelakang nama anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat Bagi Pendatang oleh Suku Marind Karena Perkawinan Eksogami di Kabupaten Merauke Papua” dapat tersusun dan terselesaikan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda Drs.H.Muhammad Darwis, M.Si dan Ibunda Dra.Hj.Sitti Rosnani Karay, M.Si, yang telah menjadi inspirasi, telah mendidik dengan penuh kasih sayang, serta doa-doanya yang tulus, smoga tetap diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah SWT. Terima kasih kepada Prof.Dr.Aminuddin Salle, S.H,M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Sri Susyanti Nur, S.H,M.H., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing saya

Memberikan arahan, dan perhatiannya dengan penuh ketulusan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi SpBo selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta seluruh jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof.Dr.Anwar Borahima, S.H., M.H., Ibu Prof.Dr.Farida, SH., M.Hum., dan bapak H.M.Ramli Rahim, S.H., M.H., selaku tim penguji.
4. Pimpinan dan dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas hasanuddin Makassar yang telah memeberi bantuan sehingga penulis dapat mengikuti serta merampungkan skripsi ini.
5. Pemerintah Kabupaten Merauke yang telah memberikan izin penelitian di wilayahnya
6. Lembaga Masyarakat Adat Suku Marind Anim, Bapak kepala suku Kasimirus Gomo Ndikend, bapak Mas'ud Samin,S.H,M.H., bapak Alberth Gebze Moyuend S.sos., dan bapak H.Abdul Awal Gebze, berserta pimpinan, staf, anggota-anggota Lembaga Masyarakat Adat Marind anim yang telah memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Keluarga besar dan adik-adik penulis Achbar Ardiansyah Putra Darwis, Nurul Habiba Darwis, dan Sitti Hafizah Darwis atas dukungan, doa dan motivasi yang tidak pernah berhenti.
8. Sahabat-sahabat penulis Arandy Achmad tunribali, S.H., Farid Machmud, Putri Fatimah Nurdin, S.E., dan Ayu Amalia untuk doa, dukungan, waktu, bantuannya, dan terima kasih kepada teman-teman angkatan 2007 Ekstradisi Fauzia, dan Indri .
9. Semua pihak yang sangat membantu proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima sumbangsi pemikiran baik berupa saran maupun kritikan demi kesempurnaan karya ilmiah ini agar dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT tetap memberikan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Oktober 2013

Wulandary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 6
A. Tinjauan Umum Hukum Adat	6
1. Pengertian Adat dan Hukum Adat	6
2. Fungsi Hukum Adat.....	9
3. Corak dan Sifat Hukum Adat	9
B. Masyarakat Hukum Adat	13
C. Perkawinan Adat	17
D. Ciri Masyarakat Papua	21
E. Fungsi Gelar Dalam Masyarakat Adat	26
	ix

BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Lokasi Penelitian	34
	B. Sumber Data	34
	C. Teknik Pengumpulan Data	35
	D. Analisis Data.....	35
 BAB IV	 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 36
	A. Bentuk Perkawinan Adat Eksogami yang Dilakukan oleh Adat Suku Marind di Kabupaten Merauke	36
	1. Sejarah dan Susunan Lembaga Adat Suku Marind	36
	2. Tata Cara Perkawinan Adat Eksogami Dalam Lembaga Adat Suku Marind.....	41
	3. Sah-Tidaknya Perkawinan Adat Dalam Suku Marind	43
	B. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Individu yang Memperoleh Gelar Adat Akibat Perkawinan di Lembaga Adat Suku Marind di Kabupaten Merauke	45
	1. Hak-hak.....	45
	a. Hak-Hak Untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tanah Adat Untuk Tujuan Ekonomi	45
	b. Hak Untuk Menetap/Berdomisili.....	49

	c. Hak Dusun.....	51
	2. Kewajiban	52
BAB V	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku yang majemuk. Beragam suku ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan keunikan tersendiri dari Bangsa Indonesia diantara negara-negara lain di dunia. Berbagai macam suku tersebut memiliki berbagai macam adat-istiadat dan prosesi-prosesi adat lainnya yang berimplikasi terhadap kemajemukan aturan. Di Indonesia, hukum adat memang masih diakui keberadaannya dan diberikan kekuatan hukum untuk terus eksis sepanjang masyarakat atau lembaga hukum adatnya eksis. Fenomena sosiologis ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang masuk ke dalam ranah hukum. Pertanyaan yang paling penting adalah mengenai aplikasi hukum adat dalam berbagai macam budaya masyarakat adat tersebut. Masing-masing dari masyarakat adat tersebut memiliki perangkat kaidah masing-masing yang mengatur pergaulan mereka baik secara sosial maupun secara privat.

Koentjaraningrat menyebutkan bahwa tiap-tiap masyarakat, baik yang amat kompleks maupun yang amat sederhana bentuknya, tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau kontrol sosial.

Oleh karena itu **Burshar Muhammad** menyebutkan bahwa: "Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana da kecil pun masyarakat itu menjadi cerminnya. Karena tiap

masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifat sendiri, "*geestesstructuur*" masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan. Begitu pun halnya dengan hukum lain di dunia ini, hukum adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku. Oleh karena itu, apabila melakukan studi terhadap hukum adat Indonesia, maka berarti kita berusaha untuk mempelajari cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berfikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya struktur kejiwaan dan cara berfikir akan mewujudkan corak-corak tertentu terhadap hukumnya. Demikian pula keadaan di dalam hukum adat Indonesia akan terlihat corak-corak tertentu yang merupakan penjelmaan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir suatu bangsa. Dari kenyataan ini jelaslah bahwa hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Bagi kebanyakan orang, Papua sering dianggap sebagai "negeri antah berantah" yang relatif sulit dijangkau. Meski demikian tempat ini amat dikenal oleh komunitas yang mendiaminya. Cukup banyak publikasi menyangkut Papua yang disimpan oleh instansi-instansi pemerintah dan dalam arsip-arsip pemerintah, di berbagai perpustakaan, museum-museum, baik dalam bentuk koleksi perseorangan maupun koleksi berbagai instansi di seluruh wilayah Papua, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Selain itu Papua merupakan salah satu daerah yang sampai sekarang menganut sistem hukum adat yang sangat kental, dimana masyarakat di Papua sangat patuh pada hukum tersebut dan

yang paling unik karena daerah ini sangat diminati para pendatang untuk mencari mata pencaharian disana, tidak sedikit yang akhirnya menetap dan menikah di Papua sehingga di Papua terjadi keanekaragaman kebudayaan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sangat menarik apabila dilakukan penelitian di Papua.

Menurut informasi yang penulis peroleh dari keluarga yang kebetulan tinggal di Papua, terdapat sebuah suku yang mendiami daratan Papua yang memiliki sebuah adat yang sangat unik. Nama suku tersebut adalah suku Marind. Suku Marind ini adalah suku yang terbuka bagi para pendatang. Dalam suku ini berlaku suatu adat dimana apabila terjadi pernikahan antara pendatang di luar suku dengan salah seorang warga suku, maka pendatang (orang yang menikah) tersebut bisa mendapatkan gelar adat. Menurut adat yang berlaku di suku tersebut, apabila seseorang telah memiliki gelar adat tertentu yang diperoleh melalui pernikahan, maka ia berhak mendapatkan hak warisan untuk anak keturunannya dan dapat pula ikut serta untuk mendapat jabatan dalam kelembagaan masyarakat adat dimana dalam kelembagaan tersebut pemilik jabatan dapat ikut serta dalam memberikan masukan dan pendapat dalam kelembagaan adat di suku tersebut. Kelembagaan ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan hukum adat yang berlaku pada suku tersebut. Hal ini sangat menarik karena terdapat suatu pemberian hak kepada pendatang yang diakibatkan oleh perkawinan eksogami yang tidak diberikan sembarang kepada pendatang dari suku-suku lain yang ada di Papua. sehingga penulis memutuskan untuk membahas masalah ini dengan judul **“Akibat Hukum Penerimaan Gelar Adat Bagi Pendatang oleh Suku Marind Karena Perkawinan Eksogami di Kabupaten Merauke Papua”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan di lembaga adat Suku Marind di Kabupaten Merauke ?
2. Apa akibat hukum yang timbul terhadap individu yang memperoleh gelar adat akibat perkawinan di lembaga adat Suku Marind di Kabupaten Merauke ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan di lembaga adat Suku Marind di Kabupaten Merauke.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap individu yang memperoleh gelar adat akibat perkawinan di lembaga adat Suku Marind di Kabupaten Merauke.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum adat dan pelaksanaannya khususnya mengenai keberadaan lembaga adat suku marind di kabupaten Merauke.
2. Aspek praktis, dapat memberikan masukan bagi masyarakat hukum adat, pemerintah dan pemerintahan daerah dalam hal sistem hukum adat atau organisasi dalam pemberian gelar adat suku Marind kepada pendatang (non Papua) di Kabupaten Merauke.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku-perilaku yang terus menerus dilakukan oleh seseorang menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu. Lamban laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari msyarakat itu.

Istilah “*adat*” berasal dari bahasa arab “*adah*” yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pengertian tersebut di atas mengarah kepada suatu kebiasaan yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya berlaku pada suatu masyarakat. Adat diartikan sebagai ‘kebiasaaan’ dan telah meresap ke dalambahasa Indonesia sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah adat.setiap bangsamemiliki adat kebiasaannya masing-masing, yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya dan perbedaan adat tersebut menjadikan adat sebagai identitas dari suatu bangsa.

Isitilah "*hukum adat*" – "*adat recht*" untuk pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje untuk menunjukan adat yang memiliki sanksi adat "*die rechtsgevolget hebben*" (yang berakibat hukum). Berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan atau pandangan-pandangan yang tidak mempunyai arti hukum. Demikian halnya menurut Ter Haar tidak semua adat istiadat adalah hukum adat, tetapi sebaliknya hukum adat adalah sebagian dari adat istiadat yang padanya telah ditambah sanksi atau sanksiadat "*die rechtsgevolget hebben*".

Mengenai pengertian hukum adat, telah banyak dibahas, salah satunya adalah rumusan yang dibuat oleh seminar hukum adat dan pembiasaan hukum Nasional Tahun 1975 di Yogyakarta yang berbunyi bahwa Hukum Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama.

Terdapat pula beberapa pengertian hukum adat menurut para pakar antara lain:

- Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam putusan-putusan para pejabat hukum, yang mempunyai wibawa dan pengaruh. Serta dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan di patuhi dengan sepenuh hati oleh masyarakatnya. Pendapat Ter Haar ini kemudian terkena dengan teori 'keputusan' artinya bahwa untuk melihat suatu adat-istiadat sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat suatu sikap penguasa masyarakat terhadap si pelanggar peraturan adat-

istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

- Cornelis Van Vollen Hoven

Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat, berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

- Soepomo

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun desa-desa (customary law) semua inilah merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis sebagaimana disebut dalam Pasal 32 UUDS 1945.

Dari beberapa pendapat mengenai hukum adat tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hukum adat memiliki beberapa unsur yang membentuknya, yaitu:

- Adat

Adat berasal dari bahasa arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.

- Penegakan oleh fungsionaris hukum

Masyarakat hukum adat mengenal prosedur penegakan hukum oleh para fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus.

- Sanksi adat

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberisanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan.

- Tidak tertulis

Materi–materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis. Namun, tidak berarti bahwa penulisan hukum tidak berlangsung. Tercatat bahwa kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk telah memiliki sistem hukum modern yang terdokumentasikan dalam *Negarakartagama*, (monografi hukum adat pada masa Kerajaan Majapahit).

- Mengandung Unsur Agama

Hukum adat mengandung unsur agama, terutama agama Hindu dan Islam. Kedua agama tersebut banyak mempengaruhi hukum adat karena terdapat satu persamaan yang signifikan dan keduanya memiliki yang sangat sakral.

2. Fungsi Hukum Adat

Tentang fungsi hukum adat, Soerjono Soekanto menyebutkan dua fungsi hukum adat yaitu pertama sebagai sarana paksaan, yang melindungi warga masyarakat, dan kedua sebagai sarana yang berupa kerangka aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang bertujuan untuk melancarkan interaksi sosial.

Mengenai kedudukan serta peranan hukum adat sebagai sarana untuk memperlancar interaksi social maka hukum adat dilihat melalui pandangan sosiologis hukum, sedangkan dalam prosesnya berarti hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sebagai keputusan. Dengan demikian, maka secara sosiologis, hukum dapat dianggap sebagai suatu lembaga sosial.

3. Corak dan Sifat Hukum Adat

Menurut Von Savigny, hukum adalah cerminan jiwa rakyat, oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam jiwa rakyat dan merupakan hukum yang sejati. Hukum sejati tidak dibuat-buat akan tetapi hukum tersebut ditemukan telah ada dalam masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut akan diperjelas dengan melihat karakteristik dan corak hukum adat di Indonesia sebagai berikut:

- Tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu cicit sekarang dimana keadaannya masi berlaku dan tetep dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

- Magis Religius, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum adat berkaitan dengan kepercayaan terhadap tuhan yang ghaib. Percaya adanya Tuhan Pencipta Yang Maha Esa, percaya bahwa benda-benda di alam demesta ini memiliki jiwa (animisme), dan benda-benda itu punya daya gerak (dinamisme). Percaya adanya roh-roh halus yang baik maupun yang jahat.
- Kebersamaan (komunal) artinya hukum adat lebih mengutamakan kepentingan–kepentingan bersama, hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan yang satu dengan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.
- Konkrit dan visusal artinya hubungan hukum yang terjadi dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar oleh orang lain. Misalnya dalam jual beli bersamaan waktunya antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya.
- Terbuka dan sederhana, artinya hukum adat dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana berarti bersahaja, tidak rumit, dpat dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.
- Dapat berubah dan menyesuaikan artinya hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.

- Tidak dikodifikasi, artinya hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara sehingga hukum adat itu mudah berubah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- Musyawarah mufakat artinya hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun mengakhirinya, apalagi yang bersifat peradilan. Dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan musyawarah dan mufakat serta saling memaafkan, tidak terburu-buru begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan Negara.

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan bangsa Indonesia yang berkembang secara turun-temurun dan tidak tertulis, maka hukum adatpun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini dapat bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan oleh lembaga-lembaga yang beribawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini sbetulnya merupakan sifat umum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, sebagaimana hukum adat adanya.

M.M. Djodigono dalam Koesno menyatakan bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang (dinamis), bila mana ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum

sepanjang jalan sejarahnya. Satu implikasi yang paling signifikan dari sifat dinamis ini adalah pola pengambilan keputusan hakim. Hakim dimungkinkan untuk mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama, tetapi diadili dalam waktu yang berbeda, berdasarkan asas-asas hukum yang selalu berkembang menurut perkembangan masyarakat. Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam sistem hukum tertulis. Jika diterapkan pada hukum, berarti bahwa hukum adat akan selalu menjalani perubahan yang terus-menerus melalui keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat memiliki dua sisi yang berdampingan, yang pada satu sisi lain, sebagai hukum yang pada satu sisi hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Pada sisi lain, sebagai hukum yang hidup dan berkembang, dan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi pada suatu saat hukum adat terasa sangat tebal melingkupi kehidupan masyarakat sedangkan pada saat lain, jika dikehendaki masyarakat terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-asasnya saja. Selain beberapa sifat di atas, hukum adat pun memiliki satu sifat khusus yakni terbuka. Artinya hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain (asing) tersebut patut atau bersesuaian. Perkembangan sifat ini terjadi sebagai hasil dari interaksi harmonis antara sistem-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yaitu antara hukum Islam dan hukum

Barat yang dipertahankan melalui badan-badan peradilan. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum adat dapat menerima hukum tertulis atau sistem hukum lain dalam sistem hukumnya.

B. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam kesatuan Negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Karena keragaman tersebut sehingga Van Vollenhoven membagi-bagi bangsa Indonesia ke dalam lingkungan hukum adat.

Istilah masyarakat hukum adat lebih banyak digunakan oleh Pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan akademis dalam beberapa literature, sementara Masyarakat adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) lebih menggunakan istilah masyarakat adat untuk menerjemahkan kosa kata “Indigenous peoples”, sebuah istilah yang digunakan oleh International Labour Organization (ILO) sebagai sebutan bagi entitas “penduduk asli”.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan wilayah sendiri.

Menurut Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehingga terdapat keragaman masyarakat hukum adat antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok yang bersifat tetap itu adalah warga-warga dari masyarakat hukum adat. Warga dari masyarakat hukum adat ini adalah manusia yang dalam kehidupan mereka selalu saling membutuhkan dan berhubungan satu sama lain (zoon politikon). Adanya hubungan antara satu sama lain ini menimbulkan masyarakat dan dalam masyarakat itu terdapat hukum. Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Cicero, bahwa *ubi societas ibi ius*, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.

Hazairin kemudian secara tegas memberikan kriteria masyarakat hukum adat yaitu adanya Kesatuan Hukum. Kesatuan penguasa dan Kesatuan Lingkungan Hidup. Adanya kesatuan hukum menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat itu dikuasai dan dikendalikan oleh sistem hukum adatnya masing-masing. Kesatuan penguasa menunjukkan bahwa penguasa atau pengendali tegaknya sistem hukum adat tersebut berada di tangan suatu kesatuan penguasa menunjukkan bahwa penguasa atau pengendali tegaknya sistem hukum adat tersebut berada di tangan suatu kesatuan penguasa atau dengan kata lain mempunyai sistem pemerintahan sendiri yaitu kepala rakyat (dengan istilah yang berbeda

disetiap tempat). Dengan perangkat-perangkat kelengkapan tersebut mereka menjalankan fungsinya di dalam lingkup kesatuan lingkungan hidup atau wilayah kekuasaannya yang menunjukkan indikasi territorial.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang kepala adat. Segala aktifitas masyarakat hukum adat dipusatkan kepada kepala adat yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat dari masyarakat adat yang dipimpinnya. Segala aktifitas tersebut tidak hanya menyangkut penyelenggaraan tata usaha badan persekutuan seperti urusan tanah, tetapi juga terlibat dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.

Oleh karena itu, menurut Soepomo dalam Soerjono Soekanto aktivitas kepala adat secara umum dapat dibagi dalam 3 bidang:

- Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yg erat antara tanah dan persekutuan (golongan) yang menguasai tanah tersebut.
- Penyelenggaraan tata tertib sosial dan tata tertib hukum supaya kehidupan dalam masyarakat hukum berjalan sebagaimana mestinya dan mencegah adanya pelanggaran hukum (preventif).
- Penyelenggaraan hukum untuk mengembalikan (memulihkan) tata tertib sosial dan tata tertib hukum serta keseimbangan menurut ukura-ukuran yang bersumber pada pandangan religio magis (represif).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kepala adat mempunyai peranan pada hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kepala adat

diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin. Dalam bidang hukum, kepala adat adalah penegak hukum dalam arti luas. Kepala adat harus dapat menjadi pembentuk hukum, pelaksana hukum dan pelopor perkembangan hukum.

Menurut Soepomo, secara umum bentuk dan susunan masyarakat hukum adat Indonesia dapat dibagi atas tiga golongan yaitu:

- Masyarakat hukum adat territorial

Masyarakat hukum territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu baik sebagai tempat kehidupan maupun sebagai tempat yang bersifat kerohanian.

- Masyarakat hukum adat genealogis

Masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Sifat genealogis tersebut dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat Patrilineal, matrilineal dan parental.

- Masyarakat hukum adat territorial genealogis atau sebaliknya

Masyarakat hukum adat yang bersifat territorial – genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu tetapi juga terikat dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia mendapat pengakuan hukum yang jelas dan tegas di dalam konstitusi pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar RI 1945:

- Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pentingnya pengakuan Masyarakat Hukum adat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

- *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.*
- *Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk atas hak tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.*

C. Perkawinan Adat

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Perkawinan Adat diartikan sebagai ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan

mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusui dengan manusia (Mu'Amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat di Akhirat. Oleh karenanya, **Imam Sudiyat** dalam bukunya *Hukum Adat* mengatakan:

“Menurut Hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat.”

Demikian pula diketengahkan oleh **Ter Haar** menyatakan bahwa :

”Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabak dan urusan pribadi.”

Begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh **Van Vollenhoven** bahwa :

”Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.”

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum

perkawinan terjadi seperti lamaran. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarganya, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.

Sejauhmana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Hal ini biasa dijumpai di (Bantul, Lampung, Bali) kemudian “ Perkawinan Semanda “ dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri hal ini bisa dijumpai di daerah (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yaitu di (Jawa, Mencil, Mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak

mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju (Modern).

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam, yaitu:

- **Sistem Endogami**, yaitu suatu sistim perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.
- **Sistem Eksogami**, yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya.
- **Sistem Eleutherpgami**, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistim endogami ataupun eksogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena turunan dekat, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu dan larangan **musyaharah** (=per iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.

Dari berbagai penjelasan diatas telah ditarik suatu kesimpulan bahwa, bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya

tidak berkepentingan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. dengan demikian perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” walaupun berlangsung antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

D. Ciri Masyarakat Papua

- **Organisasi Kelembagaan Bentuk Kelembagaan**

Kelembagaan adat sub suku Marind disusun dalam 4 (empat) tingkatan yaitu, tingkat penyelenggaraan kelembagaan terdiri atas :

- Pimpinan
Dewan Pertimbangan Adat dari 5 (lima) golongan.
- Staf Pembantu Pimpinan
 - Wakil Kepala Suku merangkap Ketua Adat Umum dalam Badan pelaksana harian.
 - Sekretaris
 - Bendahara
- Badan Pelaksana Kerja Harian
 - Ketua Badan Pelaksana harian
 - Koordinator yang mengurus Bidang-bidang pertanian
 - Koordinator bidang Kesrah (kesejahteraan Masyarakat)
 - Koordinator Hubungan Masyarakat (HUMAS)
 - Koordinator Pembinaan Generasi Muda.

- Badan Pengurus Kelembagaan dimasing-masing Desa (ada 5 desa) dengan masing-masing wilayah : di kecamatan okaba ada 3 (tiga) desa yaitu : desa Wlbuti, desa Dodalim, dan desa Woboyu, serta di kecamatan Kimaam terdapat 2 (dua) desa yaitu : desa Bibikem dan desa Wanam. Selanjutnya diatur sebgai berikut :
- Susunan Kepengurusan Kelembagaan di pusat desa diatur sebagai berikut :
 - Kepala Dusun umum
 - Kepala-kepala Sub.Dusun
 - Ketua Adat
 - Polisi Adat (kepala Anggota)
 - Ketua Marga ada 2 (dua) dari marga besar Geb Ha dan marga besar Sami Ha.
 - Dalam kedua marga besar terdapat sub-sub marga menurut jumlah marga yang ada didalam desa yang bersangkutan.
 - Keluarga-keluarga dalam marga sebagai warga masyarakat adat.
- **Ciri Umum**

Ciri-ciri tanda-tanda fisik orang Papua jika dilihat dengan kasat mata sangat berbeda jauh dengan sebagian besar bangsa Indonesia yang adalah keturunan rumpun Melayu dan yang mendiami pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Sedangkan orang Papua sendiri adalah keturunan Malanesia yang memiliki ciri seperti berkulit gelap kecokelatan lazimnya disebut hitam, berambut keriting dan

berombak, memiliki badan yang kekar dan tinggi, hal ini juga dikemukakan oleh **P.J.Droogle** bahwa “kesan umum adalah suatu kelompok penduduk primitif, yang terdiri atas orang-orang hitam dengan rambut keriting lebat, tinggi dan berotot di pesisir, kecil dan kekar di daerah pedalaman”.

Di Tahun 1950-1960-an Papua merupakan wilayah yang berpenduduk jarang. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda, Papua dihuni oleh kira-kira 800.000 orang Papua asli. Selebihnya ketika itu ada 16.000 orang Belanda, kira-kira sama jumlahnya dengan orang Indonesia dan hampir 3.000 orang cina. Jumlah orang Papua sejak saat itu sudah bertambah berlipat, orang-orang Belanda sudah menghilang, tetapi sementara itu para imigran dari bagian-bagian Indonesia lain bertambah tetapi juga dan terutama dari pulau-pulau wilayah timur kepulauan nusantara. Orang-orang Bugis, Buton dan Makassar secara keseluruhan ini merupakan unsur penduduk kota di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan ini merupakan unsur penduduk kota di dalam suatu masyarakat dimana penduduk asli Papua menempati posisi marjinal.

Hasil statistik Propinsi Papua mempublikasikan bahwa jumlah penduduk propinsi Papua dan Papua barat yang berkisar 4 juta-an penduduk menempati urutan terakhir dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk yang berkisar 4 juta-an itu, kemudian dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penduduk asli Papua dan penduduk non pribumi yang mendiami pulau Papua yang tentunya berasal dari luar

Papua. Khususnya untuk penduduk asli (*Indigenous people*) dapat dikelompokkan atas dua bagian utama, yaitu orang Papua yang menamakan dirinya sebagai penduduk Papua yang modern atas dasar kriteria-kriteria tertentu, sedangkan kelompok berikutnya adalah kelompok masyarakat pribumi Papua yang masih hidup secara klasik adalah orang-orang yang hidup dengan mempertahankan keaslian budaya Papua yang memang secara garis keturunan berbeda dengan masyarakat lain di Indonesia.

P.J.Drooglever mengatakan pada halaman yang sama bahwa orang papua hidup dalam kelompok-kelompok sangat kecil yang terdiri atas beberapa puluh sampai beberapa ratus orang. Jadi budaya hidup bersama orang Papua sudah ada jauh sebelum masuknya Belanda dan masuknya Indonesia di Tanah Papua.

Dilihat dari letak geografis atau topografi Papua, maka ciri orang Papua dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yaitu penduduk asli Papua yang mendiami daerah pesisir Papua (Jayapura, Biak, Seruih, Manokwari, Sorong, sebagian Fak-Fak, Mimika, sebagian Merauke, sebagian Asmat, sebagian Boven Digul, Kerom, sebagian Teluk Bintuni) sedangkan kelompok berikutnya adalah penduduk asli Papua yang mendiami daerah pegunungan Tengah Papua, antara lain Jayawijaya sebagai kabupaten Induk, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Lanny Jaya, Nduga,Membramo Tengah, Yalimo, Paniai, Dogiay, Enarotali dan Puncak.

Dilihat dari Pertumbuhan penduduk Papua sangat cepat namun penduduk pribumi masih berdiam di daerah pedesaan atau kampung. Sementara pertumbuhan non pribumi terjadi di daerah perkotaan diperkirakan 70% masyarakat pribumi Papua mendiami kampung atau desa. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kedua kelompok yaitu kelompok pesisir dan pegunungan ini kadang terjadi benturan-benturan berdampak negative terhadap nilai-nilai hidup orang Papua. Benturan-benturan atau konflik-konflik horizontal ini sering disebabkan oleh karena dua kelompok yang telah disebutkan di atas ada yang merasa lebih modern dibandingkan yang lain tetapi perlu kita syukuri kepada Tuhan karena atas anugerahNya Papua tetap selalu aman. Papua saat ini ada kelompok yang terbentuk akibat adanya perkawinan silang antara suku Melayu dan Melanesia. Kelompok ini juga dapat disebut dengan istilah "*multi ras*". Kelompok ini tentu memiliki ciri khas tersendiri karena sudah merupakan campuran dari dua ras yang berbeda. Ketika Barrack Obama menjadi "*bintang rock*" politik ketika dipilih menjadi pengucap pidato kunci dihadapan peserta Konvensi Partai Demokrat tahun 2004. *A star is born*

"Tak ada orang hitam Amerika dan orang putih Amerika dan orang latin Amerika dan orang Asia Amerika, yang ada hanyalah Amerika Serikat" (Obama).

Ucapan Obama di hadapanpeserta konvensi. Bagi Papua saat ini mungkin pidato ini sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi yang luar biasa di dalam Negara yang birokrasi dan demokrasinya morat – marit. Di dalam Negara yang banyak menganggap orang Papua terbelakang.

Perbedaan di Amerika adalah sebuah kekuatan karena mempunyai demokrasi yang luar. Kita harus menjaga perbedaan yang ada di antara sesama anak Papua karena perbedaan adalah sebuah anugerah ciri fisik, perbedaan agama (kepercayaan), perbedaan cara pandang perbedaan bahasa dan perbedaan kebiasaan hidup memang ada tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut menjadi penghalang untuk membangun negeri yang telah diberikan Tuhan. Perbedaan asal usul dan semua perbedaan yang telah disebutkan di atas adalah sebuah perekat jika memiliki hati yang saling mengasihi, dalam sebuah pembangunan adalah hal yang biasa saja, tidak baik melahirkan bahkan menanamkan benih atau ciri-ciri perbedaan dengan mengatakan bahwa golongan kita adalah golongan yang modern sedangkan golongan mereka adalah golongan yang masih hidup di daerah isolasi. Kita memiliki kesamaan sebagai orang Papua tetapi kita juga harus bersyukur untuk ciri perbedaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Semua yang hidup di atas tanah ini adalah orang Papua. Secara fisik, ada orang Papua asli dan saudara-saudara yang hidup dan membangun Papua, yang secara fisik berbeda dengan masyarakat Papua pribumi.

E. Fungsi Gelar Dalam Masyarakat Adat

Gelar dalam pandangan hukum adat merupakan kehormatan, kebesaran suatu kaum. Merupakan legitimasi bagi keberadaan suatu kaum, yang bertautan dengan kepemimpinan dan kepemilikan. Oleh karena itu, dalam pemberian gelar ada aturan yang sangat ketat. Untuk lebih memperjelas, penulis akan memaparkan fungsi gelar dalam dua perspektif, yaitu sosiologis dan religius.

- **Fungsi Sosiologis**

Dalam terminologi sosiologi kadang-kadang gelar dikaitkan sebagai kedudukan (*status*) atau kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Untuk lebih mudah mendapatkan pengertian, kedua istilah tersebut di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah “kedudukan” (*status*) saja.

Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Kedudukan Tuan A sebagai warga masyarakat adat, merupakan kombinasi dari segenap kedudukannya sebagai pemimpin, penguasa, tetua, suami nyonya B, ayah anak-anak dan seterusnya.

Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban hanya dapat terlaksana melalui perantaraan individu.

Masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada khususnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu:

- *Ascribed-status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan

kemampuan kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan dalam masyarakat adat adalah bangsawan pula. Seseorang warga kasta Brahmana di India memperoleh kedudukan demikian karena orang tuanya tergolong dalam kasta yang bersangkutan.

Pada umumnya *ascribed-status* dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, misalnya pada masyarakat feodal, atau masyarakat di mana sistem lapisan tergantung pada perbedaan rasial. Namun demikian, *ascribed-status* tidak hanya dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem tertutup. Pada sistem lapisan terbuka juga mungkin ada. Misalnya, kedudukan laki-laki dalam satu keluarga, kedudukan berbeda dengan kedudukan istri dan anak-anaknya. *Ascribed-status* walaupun tidak diperoleh atas kelahiran, tetapi pada umumnya sang ayah atau suami adalah kepala keluarga batinnya.

Untuk menjadi kepala keluarga batin, laki-laki perlu mempunyai darah bangsawan atau menjadi warga suatu kasta tertentu. Emansipasi wanita akhir-akhir ini banyak sekali menghasilkan persamaan dalam bidang pekerjaan dan politik, namun kedudukan seorang ibu di dalam masyarakat secara relatif tetap berada di bawah kedudukan seorang ayah sebagai kepala rumah tangga.

- *Acquired-status* adalah kedudukan dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar

kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuan. Misalnya, setiap orang dapat menjadi pemangku adat asalkan memenuhi persyaratan tertentu.

Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *assigned-status* yang merupakan kedudukan atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan, karena seorang telah lama menduduki suatu kepangkatan tertentu, misalnya seorang masyarakat adat setelah menduduki kepangkatannya tertentu dan selama jangka waktu yang tertentu akan dinaikkan statusnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka seseorang dalam masyarakat adat biasanya memiliki beberapa kedudukan sekaligus. Dalam hubungan macam-macam kedudukan itu, biasanya yang selalu menonjol hanya satu kedudukan utama. Masyarakat hanya melihat pada kedudukan utama yang menonjol tersebut. Atas dasar itu, yang bersangkutan digolongkan kedalam kelas-kelas yang tertentu dalam masyarakat adat.

Kedudukan seseorang atau kedudukan yang melekat padanya dapat terlihat pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu yang dalam sosiologi dinamakan *prestise-simbol (status-symbol)*. Ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian hidupnya yang telah *institutionalized* atau bahkan *internalized*. Ada beberapa ciri-ciri tertentu

yang dianggap sebagai *status-symbol* dalam masyarakat adat misalnya cara berpakaian, pergaulan, cara mengisi waktu senggang, memilih tempat tinggal, cara dan corak menghiasi rumah kediaman dan seterusnya.

Sedangkan mengenai fungsi atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari gelar adat. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu fungsi. Setiap gelar mempunyai macam-macam fungsi yang berasal dari pola-pola pergaulan kehidupan masyarakat adatnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa gelar menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya gelar adat dalam pandangan sosiologi adalah karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang. Gelar adat juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Gelar yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Gelar seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Gelar lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta

menjalankan suatu peranan. Fungsi gelar adat dalam pandangan sosiologis mencakup tiga hal, yaitu:

- Legitimasi dalam menjalankan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang yang menyandang gelar dalam masyarakatnya. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Legitimasi dalam membuat atau menerjemahkan konsep-konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Gelar adat juga berfungsi sebagai penjelmaan keputusan masyarakat adat yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi, gelar dalam perspektif sosiologis juga dikaitkan dengan fungsi yuridis. Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu pemegang gelar (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu yang memiliki gelar tertentu untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan atau gelar ketimbang peranan dari gelar tersebut. Gejala

tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spritualisme.

Nilai materialisme di dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau cirri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah, misalnya, gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, akan tetapi bukanlah yang terpenting di dalam pergaulan hidup manusia.

d Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, akan tetapi belum proporsional sifatnya. Padahal, menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila seorang kepala suku, misalnya, lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya, maka dia akan menuntut agar warga masyarakat lebih banyak melayaninya (padahal, salah satu peranan seorang kepala suku adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat). Faktor inilah yang antara lain mengakibatkan terjadinya halangan-halangan didalam menerapkan birokrasi yang positif.

Di dalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari, bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan, sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja sedang pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban.

- **Fungsi Religius**

Gelar juga berkaitan dengan dunia religius atau hal-hal yang sifatnya spiritual. Artinya gelar menunjukkan bahwa penyandanginya mempunyai keutamaan tertentu dari sisi spiritual di dalam masyarakatnya. Keutamaan ini misalnya berdasarkan kedekatan penyandang gelar dengan sesuatu yang dijadikan sembah dalam suatu masyarakat adat ataupun sebagai wakil dari yang disembah tersebut. Sebagai contoh adalah gelar “Daeng” atau “pakdaengang”.

Menurut **Aminuddin Salle**, “pakdaengang” ini maknanya antara lain:

Penghambaan dari Nama Allah, kurang lebih sama dengan nama Islam yang ditabahi dengan Abdul. Misalnya Daeng Patoto, Patoto dalam lontara artinya pencipta, sehingga Daeng Patoto adalah hambah dari yang maha pencipta, sehingga Daeng Tanicalla, artinya tak tercela. Yang bersangkutan memberikan nama harum bagi keluarga dan masyarakat. Daeng Gemilang, agar tampil lebih gemilang. Daeng Nikeknang, agar selalu dikenang. Daeng Kanang agar ia cantik, Daeng Baji agar dia baik hati, Daeng Puji agar dia menyenangkan.

Dari pernyataan di atas, tampak bahwa fungsi gelar di sini adalah sebagai doa agar makna gelar tersebut terealisasi dalam kepribadian orang yang menyandanginya. Ada juga gelar yang menunjukkan bahwa penyandang gelar tersebut memiliki otoritas dalam memimpin upacara-upacara atau ritual-ritual kepercayaan sehingga gelar dalam artian ini memiliki fungsi religius.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Merauke Provinsi Irian Jaya. Pertimbangan memilih lokasi ini karena daerah Irian Jaya khususnya Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, kabupaten ini adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Di kabupaten ini terdapat suku Marind Anim. Alasan mengambil lokasi karena informasi tentang sistem hukum masyarakat adat Suku Marind di Kabupaten Merauke yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Marind menarik minat penulis untuk mengadakan penelitian di lembaga adat tersebut.

B. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi dokumen tertulis yang ditemukan di lokasi penelitian dan memiliki relevansi dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview), yaitu bertemu dan dialog langsung berupa tanya-jawab dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Dokumentasi atau disebut juga pustaka (library research), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya relevan penelitian.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan secara rasional dengan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu logika sehingga menghasilkan konklusi yang benar. Hasil yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perkawinan Adat Eksogami yang Dilakukan Oleh Adat Suku Marind di Kabupaten Merauke

1. Sejarah dan Susunan Lembaga Adat Suku Marind

Sejak penciptaan alam semesta oleh Allah menurut Alkitab atau kitab Suci lainnya, kita ketahui dimana saja tempat-tempat kejadiannya. Dari latar belakang sejarah yang ada, manusia di bumi ini dikisahkan tentang kehidupan Spritual manusia ada sebagai situs-situs kehidupan yang memelihara dan menjaga keseimbangan hidup manusia dengan alam semesta, lingkungan dan manusia.

Di Italia, Roma, Yunani dan Negara Eropa, serta wilayah Arab Saudi terdapat tempat-tempat situs sejarah seperti Gereja Umat Kristiani dan Mesjid serta lainnya. Pada tahun 2000 tahun yang lalu tokoh ritual umat kristiani mulai menyebar menjelajahi bumi hingga tiba di tanah suku malind sekitar tahun 1902. Manusia Malind Anim, selaku pendudukan asli yang hidup ditempat ini sebelum bangsa-bangsa lain pinjakan kaki dan hidup di bumi Anim Ha ini, suku marind sudah ada jauh sebelum-sebelumnya.

- Ada berbagai macam tanggapan terhadap suku marind pada saat itu.
- Suku Marind Anim mempunyai sejarah seperti bangsa-bangsa lain didunia dan lebih khusus lagi bangsa Ras Melanesia di tanah Papua.

- Suku Marind mempunyai tempat dan wilayah pendudukannya menurut kelompok yang bersifat Familiar dan mereka hidup mencari makan dan bercocok tanam, berburu binatang, menangkap ikan tentunya dengan tatanan aturan mengambil dari Alam serta menjaga dan melestarikan alam sesuai nilai-nilai dari budaya adat suku Marind Anim dan sangsi hukum yang diberlakukan.

Dari masa kejadian penciptaan pendudukan dan tetap hidup tumbuh dan berkembang. Tempat kering, rawa, hutan, dan sungai menjadi wadah kehidupan mereka. Spritualisme hidup mereka juga mengalami perkembangan keseimbangan alam dan manusia. Tuhan mengaruniakan manusia untuk hidup dan berketurunan serta memelihara alam. Manusia Marind menyadari dan meyakini siapa mereka sebenarnya dan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap alam semesta dan sesamanya. Sungai dan rawa itu harus dihargai, diyakini sebagai suatu kekuatan, spritualitas untuk hidup. Wilayah suku Marind Anim dalam penciptaannya di bagi 3 bagian wilayah besar dan mempunyai sub-sub wilayah dan hak ulayat (tempat mencari makan).

- Wilayah hukum adat Sandawi dengan batas wilayahnya dari sungai Torasi(kondo) sampai dengan sungai Biah.
- Wilayah hukum Adat Muli Anim dengan batas wilayahnya dari muara Sungai Digoel sampai dengan Selat Mariana(selat Muli)
- Wilayah Hukum Adat Kelepom Anim dengan batas wilayahnya dari sungai Selat Muli dan Laut Arafura (Pulau Kiman).

Sudah ada pengelompokan masyarakat adat secara Antropologi, yang dapat dikenal secara baik sehingga juga dapat melihat perbedaan

sikap, tatacara dan kesamaan bahkan satu kesatuan besar dalam komunitasnya dimana mereka hidup saling bersinggungan satu dengan lainnya dalam satu kesatuan tatanan:

- Adat kebiasaan
- Spritualisme
- Bercocok Tanam
- Mengelolah dan konsumtif
- Sangsi dan hukuman
- Perlakuan terhadap lingkungan tanah, sungai, air/rawa/ikan, hutan dan pohon, benda-benda alam, serta hal-hal abstrak.

Bentuk kelembangaan adat Marind berdasarkan Organisasi Garis dan Staf, namun disesuaikan lagi dengan kebutuhan kelembagaan. Kelembagaan adat sub suku Marind disusun dalam 4 (tingkatan) yaitu: tingkat penyelenggaraan Kelembagaan terdiri atas:

- Pimpinan
Dewan pertimbangan adat dari lima golongan.
- Staf Pembantu Pimpinan
 - Wakil kepala suku merangkap Ketua Adat Umum dalam Badan pelaksanaan harian.
 - Sekretaris
 - Bendahara
- Badan pelaksana Kerja Harian
 - Ketua Badan pelaksana Harian
 - Koordinator yang mengurus Bidang-bidang pertanahan.
 - Koordinator bidang kesrah (Kesejahteraan Masyarakat).

- Koordinator Hubungan Masyarakat (HUMAS).
- Koordinator Pembina Generasi Muda.
- Badan pengurus kelembagaan dimasing-masing desa dengan masing-masing wilayah: di kecamatan Okaba ada tiga desa yaitu desa Welbuti, desa dedalim dan desa Woboyu. Serta kecamatan Kimaam terdapat dua desa yaitu desa Bibikem dan desa Wanam. Selanjutnya di atur sebagai berikut:
- Susunan kepengurusan kelembagaan di pusat desa diatur sebagai berikut:
 - Kepala Dusun Umum
 - Kepala-kepala sub Dusun
 - Ketua Adat
 - Polisi Adat (Kepala Anggota)
 - Ketua Marga ada 2(dua) dari marga besar Geb Ha dan marga besar Sami Ha.
 - Dalam kedua marga besar terdapat sub-sub marga menurut jumlah marga yang ada didalam desa yang bersangkutan
 - Keluarga-keluarga dalam marga sebagai masyarakat adat.

Berikut adalah skema Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti

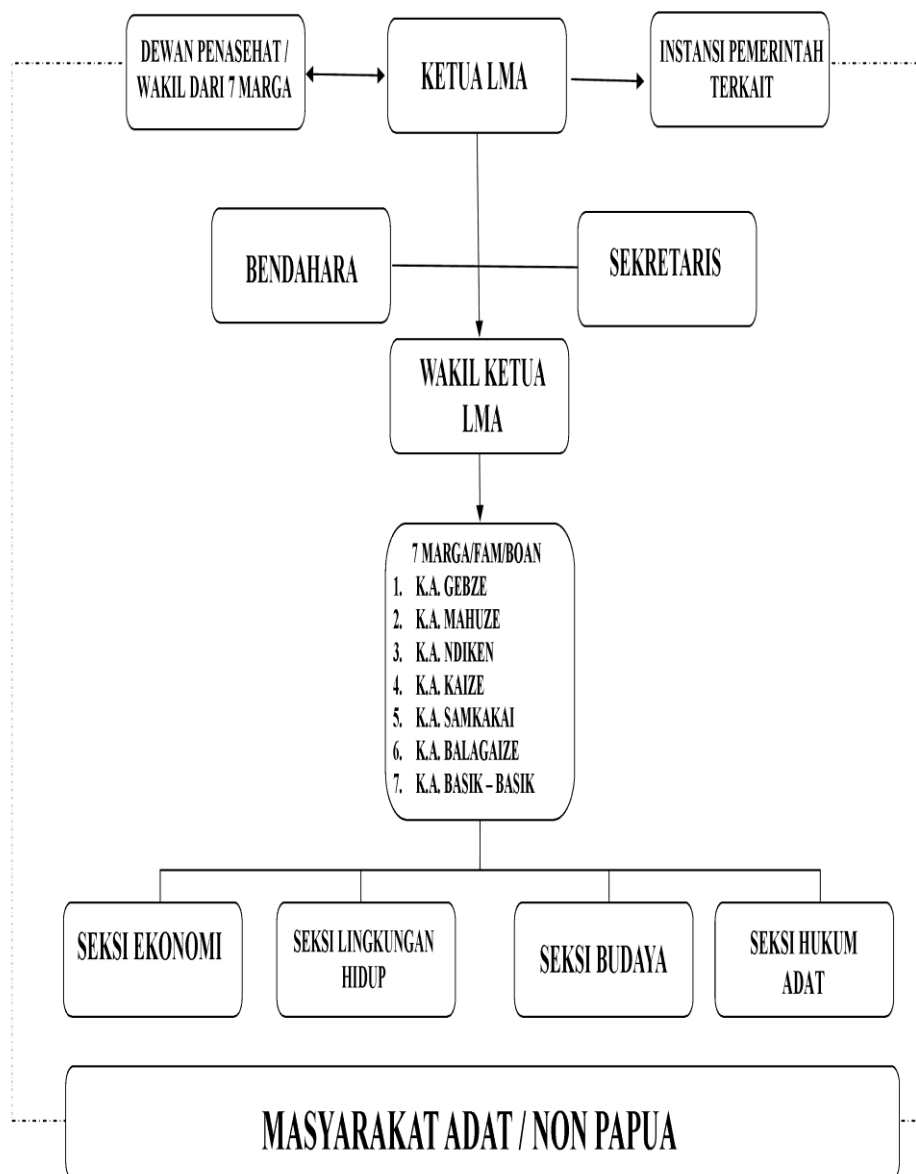
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MARIND IMBUTI

DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE PAPUA

JALAN ARAFURU NO.7 SAMKAI MERAUKE—PAPUA

STRUKTUR ORGANISASI LMA MARIND IMBUTI MERAUKE

DIBERLAKUKANNYA UU NO.21 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA



2. Tata Cara Perkawinan Adat Eksogami Dalam Lembaga Adat Suku Marind

Salah satu hubungan hukum antara manusia itu adalah adanya perkawinan. Perkawinan manusia sangat penting dalam kehidupannya, sebagai pelanjut keturunan. Kasimirus Gomo Ndikend, perkawinan bagi masyarakat adat Marind bukan sekadar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai”. Beliau pula menambahkan bahwa hukum adat Suku Marind, khususnya perkawinan sangat memperhatikan prinsip dasar yaitu **Anim Ha** (artinya manusia hakiki), yang merupakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa segala penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, upacara adat dilakukan menurut hukum yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur.

Salah satu syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat suku Marind adalah pihak laki-laki harus membayar mas kawin. Mas kawin yang mempunyai nilai kekayaan yang sangat besar, sangat penting dalam hubungan kekerabatan masyarakat adat. Menurut adat-istiadat masyarakat adat suku Marind, mas kawin terdiri dari berbagai barang perhiasan, dan jenis yang terpenting adalah cincin yang terbuat dari kulit kerang (*sebkos*, yang artinya “bulan”). Jenis-jenis lainnya adalah kalung manik-manik, kalung yang terdiri dari rangkaian gigi anjing (*kdart*), ikat pinggang yang terbuat dari anyaman manik-manik (*bitem*), beberapa buah

gelang dari manik-manik (*mak*), dan sejumlah gelang kaki yang terbuat dari ikatan tali-temali (*weikoki*). Untuk menumpulkan benda-benda yang dianggap sebagai mas kawin tersebut biasanya diperlukan waktu yang lama.

Kecuali benda-benda tersebut di atas, mas kawin juga terdiri dari beberapa unsur lain, seperti pakaian, bahan makanan, alat-alat dapur, benda-benda yang terbuat dari tanah liat dan wadah-wadah, serta sejumlah bahan makanan. Oleh karena sekarang sulit memperoleh benda-benda tradisional yang menjadi mas kawin tersebut, maka masyarakat adat suku Marind biasa memberikan toleransi seperti penggantian dengan uang tunai sebagai pengganti mas kawin.

Seorang calon pengantin pria yang bukan warga masyarakat adat suku Marind dan keluarganya diwajibkan menyediakan mas kawin pada waktu perkawinan dilaksanakan, dan sekarang lazim ditunda pembayarannya beberapa bulan, bahkan sampai lebih dari setahun. Sementara itu ayah pengantin pria, dibantu para kerabatnya dari pihak ibunya, terutama saudara-saudara kandung pria ibunya, berupaya mengumpulkan mas kawin itu, paling sedikit satu unsur tradisional diupayakan untuk melengkapi mas kawin, karena hal itu meningkatkan gengsi mereka. Kaum kerabat yang tinggal di kota besar dihimbau untuk menyumbang pakaian, bahan pakaian, dan makanan kaleng.

Penyerahan mas kawin dilakukan dengan suatu upacara kecil di rumah kerabat pengantin yang berasal dari masyarakat suku Marind apabila terjadi perkawinan eksogami. Maksud utama dari peristiwa ini adalah untuk memperlihatkan benda-benda yang diserahkan kepada para

kerabat dan tamu yang diundang. Pesta yang berlangsung sesudah upacara penyerahan mas kawin di waktu sore hari. Tamu-tamu yang hadir duduk dalam maupun di luar rumah. Minuman teh dan makanan kecil dihidangkankan kepada tamu, yang kemudian disusul dengan makan malam.

Apabila semua orang sudah selesai makan, tamu-tamu yang duduk di dalam di minta keluar, karena ruangan dalam akan digunakan untuk menyusun benda-benda mas kawin yang akan dipertontonkan di atas sehelai taplak meja yang diletakan di lantai. Para wanita berkerumun untuk mengamati penuh perhatian sambil melontarkan komentar-komentar panjang mengenai unsur mas kawin. Dan para pria menyanyi dan menari yang berlangsung hingga pagi hari. Pada saat keesokan harinya saatnya benda-benda mas kawin tersebut diserahkan oleh paman pengantin dari garis keturunan ayahnya kepada kerabat pengantin wanita. Di antara semua kerabat pengantin itu, saudara kandung pria ibunya selalu harus turut hadir.

3. Sah-Tidaknya Perkawinan Adat Dalam Suku Marind

Dengan adanya pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, yang salah satunya hukum Perkawinan adat. Permasalahan adalah perkawinan adat tersebut sah atau tidak sah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan sebagai berikut:

- Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini mengatur dan sekaligus mengakui hukum perkawinan yang lain yaitu hukum agama mengenai perkawinan dan hukum pemerintah mengenai perkawinan (pembuat UU Perkawinan tidak melihat kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini).

Pada masyarakat adat terdapat juga beberapa syarat yang menentukan suatu pernikahan di katakan sah apa bila kedua mempelai tersebut memiliki sistem kepercayaan yang sama dan terpenting adalah dalam masyarakat Adat syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Marind adalah pihak laki-laki harus membayar mas kawin, mas kawin yang diberikan bisa berupa barang atau binatang pemeliharaan seperti babi yang telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua keluarga.

Pada masyarakat adat suku Marind, hukum perkawinan adat masih diberlakukan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri. Dalam kaitan dengan hukum perkawinan adat menurut Hilman Hadikusuma (2007:8) sebagai berikut:

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap Sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum adat suku Marind, bukan saja dilihat dari pembayaran mas kawin, upacara perkawinan dan syarat-syarat lainnya, tetapi dilihat juga dari aspek pergaulan atau sebutan kekerabatan. Aspek pergaulan dan kekerabatan dinilai dari sikap dan perilaku para pendatang yang terdiri dari variabel sikap menghormati, menghargai dan sopan santun.

B. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Individu yang Memperoleh Gelar Adat Akibat Perkawinan di Lembaga Adat Suku Marind di Kabupaten Merauke

Pemberian gelar adat sesungguhnya tidak lepas dari alasan. Terdapat berbagai macam alasan yang mendasari pemberian gelar oleh masyarakat adat tertentu terhadap seseorang.

Terhadap berbagai macam perkawinan, terdapat suatu perbedaan khas antara akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang diselenggarakan menurut aturan hukum adat dengan perkawinan yang diselenggarakan secara konvensional terlepas dari pengaruh hukum adat. Berbagai akibat hukum tersebut berhubungan dengan berbagai macam hak dan kewajiban yang dipredikatkan kepada pihak-pihak yang mengadakan ikatan perkawinan. Adapun akibat-akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak

a. Hak-Hak Untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tanah Adat Untuk Tujuan Ekonomi

Masyarakat adat suku Marind adalah masyarakat yang cenderung memiliki budaya yang tertutup terhadap orang-orang yang berada di luar lingkungan sosialnya. Ini dibuktikan dengan terlarangnya segala macam usaha-usaha yang berkenaan dengan kegiatan pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang masuk dalam teritorial wilayah adat mereka. Oleh karena itu, terhadap pendatang yang bermaksud untuk mengadakan kegiatan usaha, maka mereka terlebih dahulu harus

memperoleh izin dari kepala suku dan memperoleh rekomendasi dari penasihat suku. Salah satu akses yang bisa dijalankan oleh para pendatang adalah dengan memperoleh status keanggotaan masyarakat suku adat yang diperoleh lewat jalur perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami antara pendatang dengan salah satu anggota masyarakat hukum adat suku Marind bisa mengubah status pendatang tersebut dari orang asing (eksternal) menjadi anggota (internal). Melalui perkawinan eksogami, pihak pendatang akan diberikan sebutan-sebutan yang berdasar status sosialnya dalam struktur kekeluargaan. Sebutan-sebutan tersebut yaitu:

- nikna (anak mantu perempuan);
- mbit (kakak ipar laki-laki);
- ne (kakak ipar perempuan);
- sahok (adik ipar laki-laki);
- amay (tete dan nene);
- yai (om);
- kak (tanta);
- naheb (cucu ipar laki-laki);
- nasu (sepupu).

Sebutan-sebutan tersebut dianggap sebagai gelar individual akibat suatu prosesi perkawinan adat. Para pemilik gelar atau sapaan tersebut secara otomatis memiliki izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencarian nafkah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam teritorial masyarakat adat suku Marind selama yang bersangkutan

tidak melanggar aturan-aturan yang menjadi batasan. Hasil dari eksplorasi dan eksploitasi tersebut berstatus sebagai hak milik dari yang bersangkutan.

Adapun mengenai tanah maka pemegang gelar tersebut dapat memiliki baik dalam bentuk hak milik ataupun menguasai suatu hak yang berbentuk seperti Hak Pakai dan hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang.

Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa

apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Perlakuan terhadap Dusun, hutan, rawa, sungai dan lapang. Perilaku manusia Adat, dalam ajaran adat suku Marind, sangat dijunjung Tinggi tentang hak dan kewajiban setiap orang. Ini terpatik disetiap pribadi setiap pribadi setiap orang masyarakat adat suku Marind Anim di masa lalu.

- Hal melewati dusun, hutan, rawa, lapang maupun sungai, pada bagian-bagian tertentu yang sesungguhnya bukan merupakan wilayah bagian dari padanya, maka siapapun tidak punya hak apapun untuk menebang, membuka lahan, mengambil sesuatu, meninggalkan bekas kaki yang bukan jalan umum, ataupun membuka lahan, tanpa dilarangpun sudah harus jelas, tahu dan memahami, apa hak dan kewajibannya.
- Memelihara lingkungan hidup, menjaga keseimbangan alam dengan para leluhurnya, dema atau tuan-tuan tanahnya, yang diyakini bahwa mereka menjaganya, dan tahu menurut keturunnya, sehingga Alam itu benar-benar dijaga, segala limbah, baik misalnya: ada buruan yang didapat, babi, saham (kangguru) dan lainnya, didapat maka tindakannya adalah semua kotoran harus dikubur, dibakar, kulit dan tulang-tulang, pohon sagu yang ditebang, tidak boleh ditinggalkan dengan pelepah daunnya tidak dipotong dan disusun rapi, ditutupi jika tidak sedang diolah.

- Tidak membuang sisa-sisa potongan ikan, tulang dan lain-lainnya kedalam sungai, karena semua hal yang tidak digunakan lagi apa bila tidak ada tindak pengamanannya atau menyimpan, maka orang yang melakukan hal tersebut akan mendapat sial dan alam selamanya tidak akan bersahabat. Oleh sebab itu, kenapa keseimbangan alam semesta menjadi bagian dari hidup masyarakat suku Marind.

b. Hak Untuk Menetap/Berdomisili

Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Domisili atau tempat kediaman itu adalah tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya.

Tempat kediaman hukum adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya

serta kewajiban-kewajibannya, meskipun sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di lain tempat. Menurut Pasal 77, Pasal 1393; 2 KUHPerdata tempat tinggal itu adalah “tempat tinggal dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan”. Bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh berada. Terdapat dua macam domisili yaitu domisili riil dan domisili opsional. Domisili riil yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang seumumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan antara:

- Tempat tinggal sukarela/bebas yang tidak terikat/tergantung hubungannya dengan orang lain.
- Tempat tinggal yang wajib/tidak bebas yaitu yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya: tempat tinggal suami istri, tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya, orang di bawah pengampuan di tempat kuratornya.

Tempat tinggal opsional, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini untuk memudahkan pihak lain atau untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut. Tempat tinggal opsional ada dua macam yaitu:

- Tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang misalnya dalam hukum acara dalam menentukan waktu eksekusi dari vonis.

- Tempat kediaman yang dipilih secara bebas misalnya dalam melakukan pembayaran memilih kantor notaries (menurut sri soedewi M. Sofwan).

c. Hak Dusun

Hak dusun merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh mempelai laki-laki/perempuan yang merupakan salah satu akibat hukum dari perkawinan eksogami dengan warga masyarakat adat suku Marind. Hak dusun adalah suatu paket yang terdiri beberapa macam hak, yaitu:

- Hak untuk menerima warisan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang termasuk ke dalam benda-benda tidak bergerak dan benda-benda yang dianggap sakral;
- Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan adat suku Marind;
- Hak untuk menyatakan pendapat dan usulan dalam rapat-rapat yang diadakan oleh dewan adat;
- Hak untuk ikut menjadi pengurus dalam struktur organisasi adat.

Hak dusun yang bersifat pribadi diberikan apabila orang tersebut dianggap cakap dalam artian memiliki budi pekerti yang dianggap sesuai dengan standar “baik” dan jasa-jasa dalam pandangan mertuanya. Hak ini diwariskan secara turun-temurun sebagai tali kasih atas jasa-jasanya kepada mertuanya dengan cara menyerahkan beberapa ekor babi untuk disantap dalam sebuah pesta adat. Sedangkan hak dusun yang sifatnya social dilihat dari jasa-jasa orang tersebut kepada masyarakat adat suku Marind secara umum dengan penyerahan hak yang dilakukan dengan

ritual yang sama yaitu dengan menyerahkan beberapa ekor babi yang akan digunakan dalam suatu ritual adat untuk menyerahkan hak.

2. Kewajiban

Akibat hukum selain hak adalah kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi karena pemberian gelar adat yang telah penulis sebutkan pada pembahasan sebelumnya akibat perkawinan eksogami terhadap pihak pendatang adalah kewajiban untuk memberikan nafkah (bagi suami), kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis, kewajiban untuk menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat suku Marind dan pemberian nama marga dibelakang nama anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Kewajiban ini sebenarnya hampir sama dengan kewajiban suami-istri yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut "UUP") yang mengatur bahwa:

"Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Hal ini diakui pula dalam pandangan masyarakat adat suku Marind.

Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan

persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalah gunakan haknya.

Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga. Oleh karena itu, isteri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tangganya oleh sebab itu isteri harus menghormatinya didalam Isteri mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik. Dan Isteri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena istri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 34 UUP yang menentukan bahwa:

- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari UUP menyelaraskan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW. Suami diwajibkan melindungi isterinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga isterinya, suami wajib membimbing dan memimpin isterinya secara baik, menjaga jangan sampai isterinya menyeleweng dari tujuan perkawinan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat isterinya di mata masyarakat.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 UUP tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada isteri. Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti

menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk isterinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.

Adapun maksud dari pada pasal 34 ayat 2 UUP, yaitu adalah isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena isteri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Isteri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun istri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan di dalam masyarakat adat suku marind dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tata caranya yaitu dengan memberikan beberapa mas kawin yang telah ditetapkan jenisnya dan melakukan beberapa ritual/ prosesi adat peminangan (bagi laki-laki).
2. Akibat hukum dari pemberian gelar akibat perkawinan eksogami yang dilakukan dalam masyarakat adat suku Marind terdiri dari dua hal yaitu hak dan kewajiban. Hak-hak yang ditimbulkan berupa hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tergolong dalam teritorial suku Marind, hak untuk berdomisili dan hak dusun. Sedangkan kewajibannya adalah kewajiban untuk memberikan nafkah (bagi suami), kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis, kewajiban untuk menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat suku Marind dan pemberian nama marga dibelakang nama anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya segala hal yang menyangkut budaya dan adat istiadat yang masih eksis sampai sekarang haruslah dilihat secara kritis sehingga ajaran-ajaran tersebut mampu dipahami sehingga mampu dijadikan sebaga bahan masukan dalam upaya-upaya pembaharuan dan penyempurnaan hukum nasional;
2. Sebaiknya dibentuk suatu lembaga perlindungan adat resmi yang resmi dan berfungsi dalam melakukan promosi dan pengkajian berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan adat;
3. Harus terus dilakukan pembinaan mengenai perkawinan terhadap masyarakat adat berkenaan dengan proses legalisasi perkawinan menurut hukum nasional Indonesia yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Salle. *Memaknai Kehidupan dan Kearifan Lokal*. Penerbit AS Publishing. Makassar. 2011.
- C. DewiWulansari. *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung. 2009. Cet. ke-II.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- HR. Otje Salman. *Konsep tualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni. Bandung. 2002.
- Ilhami Bisri. *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.
- Koentjaraningrat, dkk. *Irian Jaya; Membangun Masyarakat Majemuk*. Percetakan Sabdodadi. Jakarta. 1994.
- L. Bernard Tanya. *Hukum Dalam Ruang Sosial*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2011. Cet. ke-II.
- M Koesno. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis)*. Mandar Maju. Bandung. 1992.
- Marthen Medlama. *Papua Membutuhkan Pemimpin Revolusioner*. Percetakan Galang Press. Yogyakarta. 2012.
- R. VanDijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung. 2006. Cet. ke-IX.
- Sakinah Safarina Putuhena. *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah*. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi; Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Ed. Baru. Cet. ke-XXXVIII.
- _____. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Cet. ke-XII.
- TolibSetiadi. *Intisari Hukum Adat di Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta. Bandung. 2008.
- <http://serlania.blogspot.com/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html>, 3 Juni 2013.